BAB 3

GAMBARAN UMUM PT.INTI (PERSERO)

UNIT PELAKSANA TEKNIS PL UNIKOM

3.1 Sejarah PT.INTI (PERSERO)

PT.Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) resmi berdiri melalui peraturan pemerintah PP No.34 tahun 1974. Sejak tanggal 30 september 1974 dengan keputusan menteri keuangan Republik Indonesia No.Kep.1711/Mk/IV/12/1974 merupakan suatu badan usaha milik negara (BUMN) dengan status perseroan dan negara melalui depkeu sebagai pemilik saham.Dalam pengelolaannya, PT.INTI (PERSERO) berada didalam lingkungan cepartemen teknik deparpostel, dibawah Dirjen Postel.

Melalui PP.No.59 tahun 1983, PT.INTI (PERSERO) dimasukan kedalam kelompok industri strategis. Sebagai BUMN yang bergerak dalam bidang industri, khususnya di sektor telekomunikasi dan elektronika profesional, PT.INTI (PERSERO) mengemban misi tertentu yang dirumuskan sebagai berikut :

" Menjadi basis/tulang punggung dari kemampuan nasional untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang telekomunikasi & elektronika profesional baik piranti lunak maupun keras dalam rangka menunjang wawasan nusantara & ketahan nasional".

Selanjutnya misi ini dijalankan menjadi tujuan objektif sebagai berikut :

1. Peningkatan kemampuan nasional dalam bidang telekomunikasi & profesional , baik piranti lunak maupun keras.
2. Menjadi penunjang utama pengembang sistem telekomunikasi nasional.

3. menjadi pendorng perkembangasn indistri nasional, khususnya industri pendukung dalam bidang telekomunikasi.
4. Peningakatan kemampuan untuk tumbuh dengan kekuatan sendiri dalam dunia usaha.
5. Menjadi sumber devisa bagi negara.

3.1.1 Periode sebelum tahun 1945

Keberadaan perusahaan ini dimulai denghan didirikan lab pos telepon & telegraf (PTT), pada tahun 1926 dijalan Moh Toha 77 Bandung. Kemudian dilokasi yang sama, pada tahun 1929 didirikan pula laboratorium radio sertta pusat perlengkapan radio. Dalam perkembangan selanjutnya, laboratorium ini menjadi bagian yang sangat penting bagi penelitian dan perkembangan pertelekomunikasian di Indonesia.

3.1.2 Periode tahun 1945-1960

Setelah perang dunia ke II berakhir, Lab di jalan Moh Toha ditingkatkan kedudukannya menjadi lab telekomunikasi, yang mencakup seluruh bidang komunikasi, yaitu: telepon, telegraf, radio,dan sebagainya. Sedangkan bengkel pusat radio ditingkatkan menjadi bengkel pusat telekomunikasi.

3.1.3 Periode tahun 1960-1969

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.240 tahun 1961, jawatan pos dan telekomuniklasi & telegraf diubah status hukumnya menjadi perusahaan

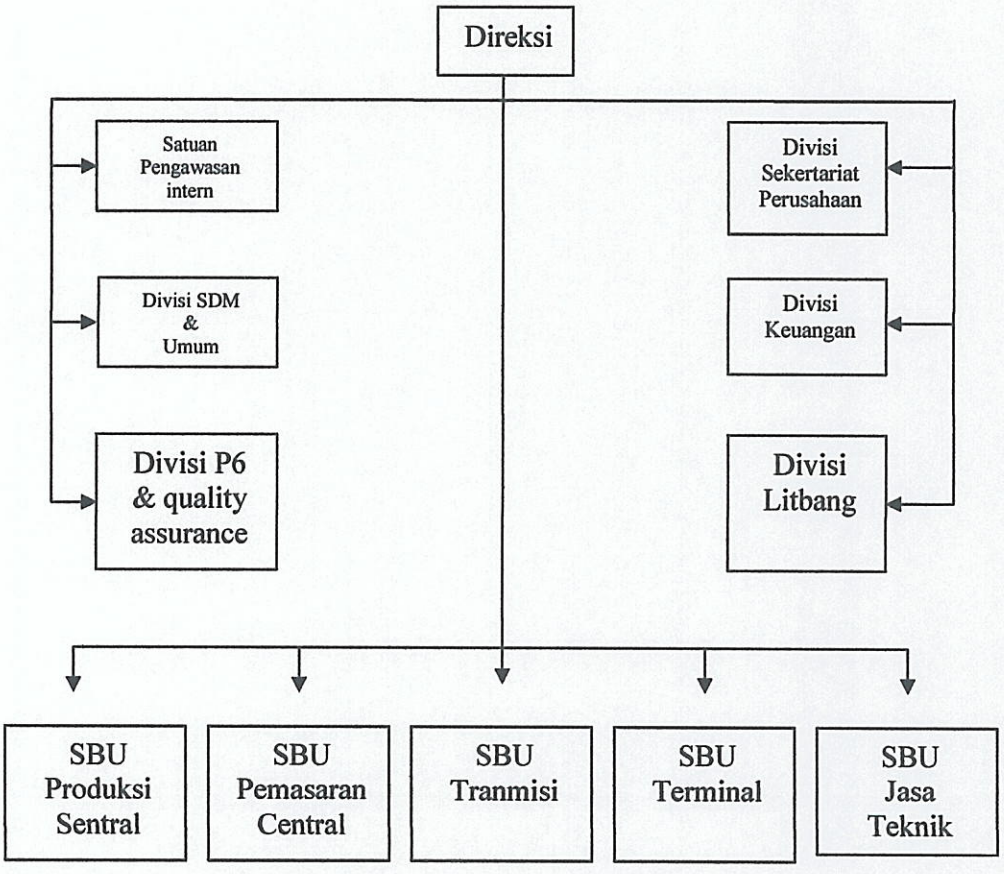
negara & telekomunikasi (PN POSTEL). Didalam struktur organisasi PN, postel antara lain dicantumkan bahwa bagian penelitian berada dibawah direktorat riset & perencanaan sementara bagian perbengkelan & kendaraan bermotor berada dibawah direktorat perlengkapan kantor. Kemudiandengan PP No.300 tahun 1965 didirikan PN.Telekomunikasi yang berasal dari PN Postel. Sebagai realisasi dari kebijaksanaan ini bagian penelitian dan poerlengkapan yang sebelumnya terpisah dalam struktiur PN. Postel digabungkan dan berganti nama menjadi Lembaga Administrasi bagian penelitian & bagian Produksi. Pada tanggal 25 mei 1966 dilakukan perjanjian kerjasama antara PN telekomunikasi dengan Siemen AG, yang pelaksanaanya dibebankan kepada lembaga penelitian & pengembangan Pos & Telekomunikasi (LPP). Untuk merealisasikan kerjasama tersebut maka pada tanggal 17 februari 1968, dibentuk bagian pabrik telepon dalam organisasi LPP Postel. Dengan adanya unsur industri, maka LPP Postel diubah menjadi Lembaga Penelitian & Pengembangan Industri Pos & Telekomunikasi yang disingkat dengan LPPI Postel. Pada tanggal 22 juni 1968, Industri telekomunikasi yang berpangkal pada pabrik telepon diresmikan pembukaannya oleh presiden RI, Soeharto dan diwakili oleh menteri Ekuin, Sri Sultan Hamengkubwono IX.

3.1.4 Periode tahun 1969-1979

Dengan lahirnya proyek Industri Telekomunikasi pada tanggal 1-3 oktober 1970, dijakarta diadakan rapat kerjasama yang menghasilkan keputusan bahwa kepada LPPI Postel diberikan waktu ± untuk mempersiapkan diri dalam bidang

keuangan, kepegawaian & peralatan. Selanjutnya pada tahun 1971 diadakan pemisahan dalam organisasi-organisasi LPPI Postel yaitu :

1. Lembaga Penelitian & Pengembangan Postel denga tugas pokok dalam bidang pengujian sarana & pengembangan sarana Pos dan Telekomunikasi, baik dalam organisasi maupun operasionalnya.
2. Lembaga Industri (Produksi) sebagai badan hukum yang berdiri sendiri dengan tugas pokok memproduksi sarana-sarana / alat-alat telekomunikasi sesuai dengan kebutuhan nasional.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT.INTI(PERSERO)

3.2 Fungsi dan Tugas masing-masing Divisi Perusahaan

1. Fungsi satuan Pengawasan Intern

Membantu direktur dalam mengadakan penelitian atas pelaksanaan manajemen serta sistem pengendaliannya.

2. Fungsi Divisi Sekretariat

Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan untuk memberikan dukungan umum dalam kaitannya dengan bidang hukum, kehumasan, sistem informasi, perencanaan perusahaan, penyelenggaraan ketatausahaan perkantoran sesuai dengan kebijakan strategi perusahaan.

3. Fungsi Divisi SDM & Umum

Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan serta mengembangkan Pengolahan sumber daya manusia & organisasi berdasarkan strategi perusahaan serta melaksanakan kegiatan pengamanan lingkungan perusahaan & pengolahan fasilitas kerumah tanggaan kantor pusat.

4. Fungsi Divisi Keuangan

Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan Pengelolaan keuangan serta sistem akuntansi perusahaan berdasarkan kebijaksanaan strategi perusahaan.

5. Fungsi Divisi Assurance & P6

Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kehandalan mutu fungsi produk & jasa yang dihasilkan perusahaan, untuk meningkatkan produktifitas perusahaan berdasarkan kebijakan strategis perusahaan.

6. Fungsi SBU Produksi sentral

Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pengelolaan produksi sentral, penjualan jasa produksi & rekayasa produksi untuk meningkatkan kontribusi usaha pada perusahaan dalam meraih keuntungan sesuai dengan kebijakan strategis perusahaan.

7. Fungsi SBU pemasaran sentral

Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan aktifitas pemasaran produk perusahaan khususnya sentral serta pemesaaran produk lain yang terintegrasi untuk kontribusi usaha pada perusahaan dalam meraih keuntungan sesuai dengan kebijakan strategis perusahaan.

8. Fungsi SBU Tranmisi

Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pengelolaan kegiatan pemasaran & produksi produk-produk tranmisi, pengadaan barang & jasa, serta kegiatam-kegiatan yang berkaitan dengan fungsi organisasi bisnis pada umumnya untuk meningkatkan kontribusi usaha pada perusahaan dalam meraih keuntungan sesuai dengan kebijakan strategis perusahaan.

9. Fungsi SBU terminal

Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pengelolaan kegiatan pemasaran & produksi produk-produk tranmisi, pengadaan barang & jasa, serta kegiatam-kegiatan yang berkaitan dengan fungsi organisasi bisnis pada umumnya

untuk meningkatkan kontribusi usaha pada perusahaan dalam meraih keuntungan sesuai dengan kebijakan strategis perusahaan.

10. Fungsi SBU dan Jasa Teknik

Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan pemasaran dan pelaksanaan jasa teknik, baik untuk kebutuhan intern mapun ekstern perusahaan, untuk kontribusi usaha pada perusahaan dalam meraih keuntungan sesuai dengan kebijakan pemerintah.

11. Tujuan SBU (Strategic Bussines Unit)

Meningkatkan kontribsi usaha pada perusahaan dalam meraih keuntungan & perkembangan perusahaan sesuai dengan misi, tujuan serta anggaran dasar perusahaan.

12. Wewenang SBU

Kewenangan SBU yang harusnya mendapat persetujuan direktur terkait dalam rangka melaksanakan aktifitasnya adalah :

- Penentuan kapasitas produksi.
- Penentuan Teknologi produksi
- Mengadakan kerjasama teknik dengan pihak luar
- Penentuan tata cara penjualan dengan pemberian fasilitas kredit
- Penjualan agen/distributor


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM